

# **Sistem Penataan Ruang dan lingkungan Kota Bandung dan Sekitarnya**

**Wahyu Surakusumah  
Jurusan Biologi  
Universitas Pendidikan Indonesia**

## **A. Pendahuluan**

Kawasan perkotaan metropolitan sebagai simpul kegiatan skala besar memiliki nilai yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah dan perekonomian nasional. Oleh karena itu kawasan-kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan sebagai kawasan tertentu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang RTRWN. Dalam revisi RTRWN yang tengah dalam proses legalisasi pun, kawasan perkotaan metropolitan tetap dipandang sebagai kawasan strategis nasional.

Arti penting kawasan perkotaan metropolitan dalam pengembangan wilayah dan perekonomian nasional terkait dengan peran kawasan perkotaan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang luas serta skala kegiatan ekonomi yang berkembang di dalamnya. Oleh karenanya kawasan perkotaan metropolitan dituntut untuk mampu berfungsi secara efektif sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang efisien sehingga dapat menunjang upaya percepatan pembangunan nasional. Inefisiensi dalam pengelolaan kawasan perkotaan dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan kinerja pembangunan dalam skala yang lebih luas, bahkan nasional.

Metropolitan Bandung, sebagaimana tercantum dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN 2015 dan Perda 2 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Barat 2010, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Metropolitan Bandung, selain akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi dengan skala

pelayanan nasional atau beberapa propinsi. Pada skala regional, Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya.

Berbagai fungsi diatas timbul sebagai akibat perkembangan yang pesat dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan kota Bandung sedemikian menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri tetapi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi terhadap kebutuhan penduduk, semakin melaju pertumbuhannya, dan telah menjadikan kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Karakter metropolitan, yang diindikasikan secara ekonomi melalui tumbuhnya mega mal, supermarket dan hypermarket, semakin lama semakin kuat melekat pada penduduk kota Bandung dan sekitarnya, bahkan sepertinya telah menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi di Kota Bandung, walaupun hal itu dilakukan melalui pengorbanan dalam bentuk kehilangan atas waktu, tenaga dan biaya

Berkaitan dengan fenomena sosial-ekonomi diatas, 2 konsekuensi langsung yang dihadapi adalah : Pertama, orientasi pergerakan menuju Kota Bandung yang tinggi. Kedua, semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya lahan dan sumber daya air. Kedua konsekuensi ini bekerja secara timbal balik, yang secara kumulatif menghasilkan bentuk *tekanan internal* bagi Metropolitan Bandung, yaitu :

1. *Kemacetan lalu lintas*. Kemacetan lalu lintas ini dipicu oleh tidak sebandingnya ketersediaan dengan kebutuhan transportasi. Kemacetan lalu lintas ini direspon oleh mekanisme pasar (ekonomi) lahan dalam

bentuk semakin dekat pusat kota semakin mahal harga lahan. Bagi penduduk yang memiliki keterbatasan ekonomi, tentunya tidak ada pilihan, mencari lahan baru diluar kota atau memilih lahan di dalam kota dengan kompensasi tertentu, seperti kualitas lingkungan yang berbeda, atau luasan lahan yang tidak sepadan. Oleh karena itu, kawasan permukiman kumuh semakin bertambah.

2. *Perkembangan guna lahan yang acak.* Penyebaran ini berbentuk acak, menyebabkan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur. Dengan adanya keterbatasan fiskal pemerintah daerah mengakibatkan adanya kesenjangan pelayanan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar. Selain itu, karakter sosial masyarakat parahyangan yang "ngariung" mendistorsi pasar lahan, sehingga mekanisme pasar lahan tidak bekerja secara penuh. Sebagai akibat tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dasar dan tuntutan pola hidup metropolis diatas, perkembangan guna lahan yang menyebar ini cenderung akan membentuk *extended metropolitan region*.
3. *Daya dukung lingkungan yang menurun.* Menurunnya daya dukung ini disebabkan pemanfaatan sumber daya yang ekstensif tanpa didukung oleh strategi pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara, serta penurunan muka air tanah dalam, merupakan indikasi kuat atas penurunan daya dukung lingkungan ini.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka sangat penting dikembangkan perencanaan tata ruang metropolitan Bandung yang menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang berkelanjutan.

## **B. Tujuan**

Perkembangan metropolitan Bandung merupakan dapat memberikan tekanan-tekanan dalam pemanfaatan ruang, oleh karena itu untuk mengatasi tekanan-tekanan yang telah dijelaskan diatas perlu diantisipasi dengan perencanaan penataan ruang yang berkelanjutan.

Makalah ini akan membahas mengenai pengembangan penataan ruang berkelanjutan (sustainable spatial planning) untuk kasus metropolitan Bandung. Selain itu Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah Sistem penataan ruang dan lingkungan (IPB-705) sebagai ujian tengah semester.

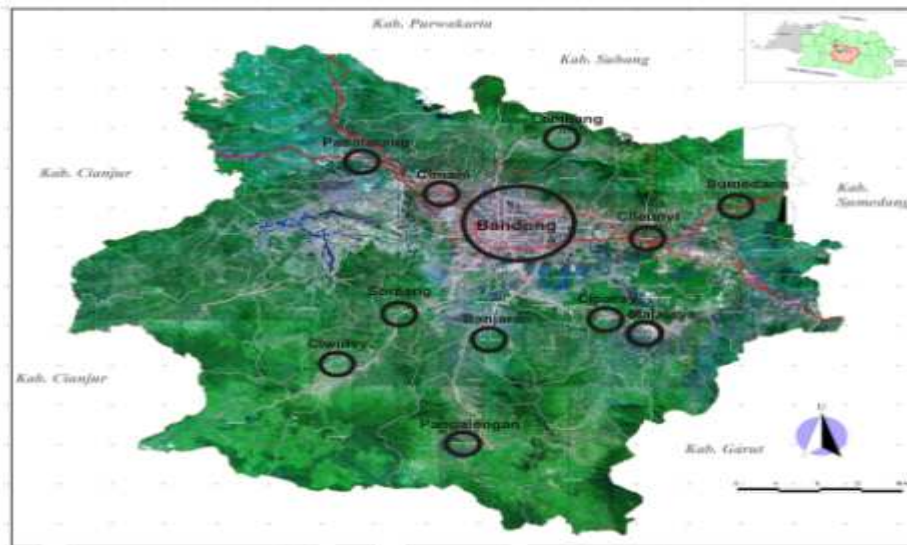
## **C. Struktur dan Pola ruang metropolitan Bandung**

### **1. Wilayah Administrasi**

Berdasarkan RTRWP Jawa Barat tersebut, diketahui bahwa wilayah metropolitan Bandung yang terdiri dari 4 wilayah administratif ini berada di Wilayah Pengembangan Tengah dengan Hirarki Kota I. Kemudian berdasarkan PP no 47 Tahun 1997 mengenai RTRWN, Wilayah metropolitan Bandung ditetapkan sebagai kawasan andalan yang mencakup beberapa kota dengan masing-masing fungsinya yaitu:

- a. Kota Bandung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Wilayah Metropolitan Bandung
- b. Kota Cimahi, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (Lembang), Kabupaten Bandung (Majalaya, Cileunyi, Banjaran, Soreang, Pangalengan, Ciwidey, Ciparay), Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang ditetapkan sebagai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Wilayah Metropolitan Bandung

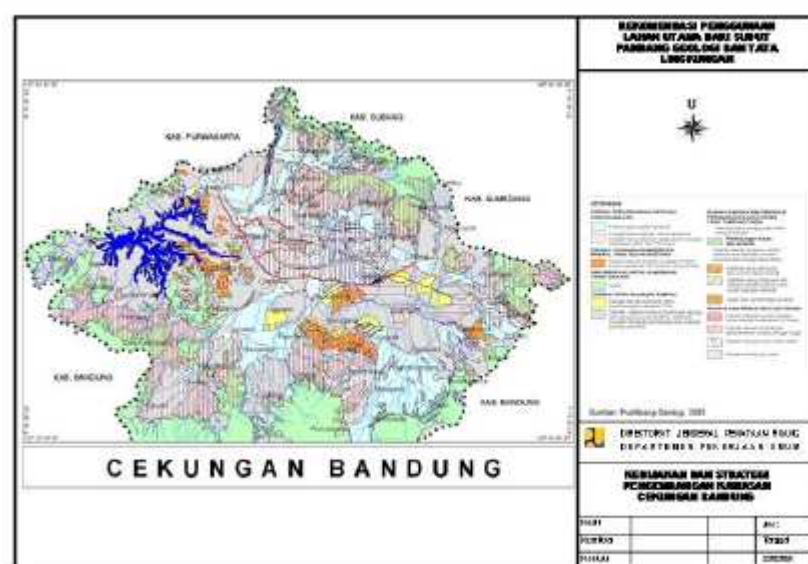
Adapun struktur wilayah di Kawasan Metropolitan Bandung dapat dilihat pada gambar 1, dengan Bandung sebagai pusatnya kemudian terdapat beberapa sub pusatnya.



Gambar.1. Pewilayahan administrasi metropolitan Bandung

## 2. Pewilayahan ekologi

Daerah metropolitan Bandung berdasarkan pewilayah ekologi terdiri dari ekosistem hutan lindung, hutan budidaya, hutan campuran, lahan budidaya, pemukiman. Selain itu wilayah metropolitan Bandung (cekungan Bandung) berada pada beberapa sub Das Cikapundung, sub Das Cimanuk, Sub Das Ciwidey, Sub Das cisangkuy, Sub Das Citarum.



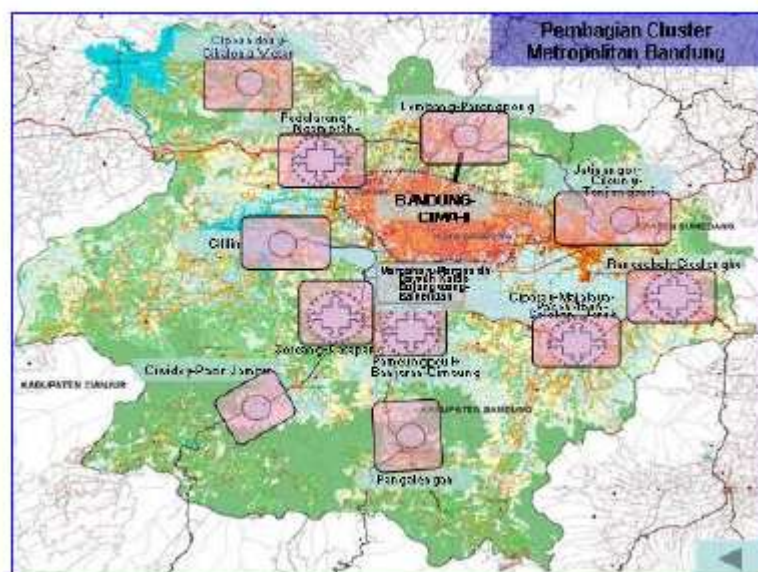
Gambar 2. Pewilayahan ekologi metropolitan Bandung



Gambar 3. Pewilayahan berdasarkan sub das metropolitan Bandung

### 3. Pewilayahan Ekonomi

Metropolitan Bandung merupakan satu kesatuan wilayah ekonomi karena pada daerah tersebut terjadi transaksi dan perputaran barang dan jasa antara kota dan kabupaten yang masuk kedalam wilayah metropolitan Bandung. Kan tetapi dalam masing-masing kota juga sebenarnya juga menjadi wilayah ekonomi sendiri. Oleh karena itu pewilayah ekonomi di metropolitan Bandung dibagi berdasarkan cluster-sluster wilayah ekonomi seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Pewilayahan ekonomi metropolitan Bandung berdasarkan cluster yang berpusat di kota Bandung.

Cluster-cluster metropolitan Bandung mempunyai peran yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah metropolitan Bandung dimana masing-masing cluster mempunyai pusat pertumbuhan ekonomi masing-masing seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Pembagian cluster-cluster pusat kegiatan ekonomi metropolitan Bandung



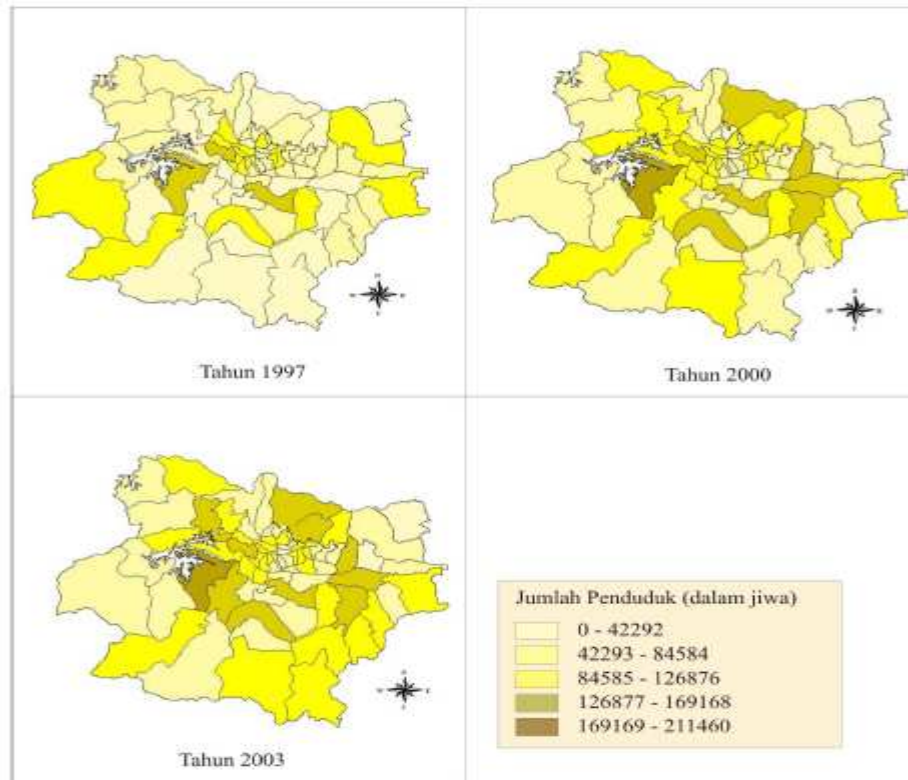
No	Hirarki	Lokasi	Fungsi Pusat Pertumbuhan
1	Kota Inti	Bandung – Cimahi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jasa</li> <li>▪ Perdagangan Grosir</li> <li>▪ Industri Non Polutan</li> <li>▪ Pemerintahan</li> <li>▪ Pendidikan Tinggi Negeri</li> </ul>
2	Sub Pusat Wilayah Pengembangan I	Lembang - Parongpong	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertanian</li> <li>▪ Pariwisata</li> </ul>
		Padalarang – Ngamprah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri</li> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
		Soreang – Katapang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintahan</li> <li>▪ Industri Pertanian</li> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
		Banjaran – Pameungpeuk – Cimaung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri Pertanian</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
		Rancaekek – Cicalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
		Jatinangor – Tanjung Sari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendidikan Tinggi</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
3	Sub Pusat Wilayah Pengembangan II	Cipendeuy – Cikalong Wetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>
		Cililin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permukiman</li> <li>▪ Pertanian</li> </ul>
		Ciwidey – Pasir Jambu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata</li> <li>▪ Pertanian</li> <li>▪ Permukiman</li> <li>▪ Perkebunan</li> </ul>
		Pangalengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata</li> <li>▪ Pertanian</li> <li>▪ Perkebunan</li> </ul>
		Majalaya Ciparay	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>

Sumber : BAPEDA Propinsi Jawa Barat, Hasil Analisis, 2004

#### 4. Pewilayahan sosial-budaya

Wilayah Metropolitan merupakan satu kesatuan wilayah sosial budaya yaitu budaya parahyangan. Akan tetapi berdasarkan pemusatan penduduk di wilayah metropolitan Bandung terdapat wilayah pemusatan penduduk seperti pada gambar 5 yang mengalami pertumbuhan.





Gambar 5. Penyebaran penduduk di metropolitan Bandung

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Metropolitan Bandung

Kecamatan/ Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		1991	1997	2000	2003
Metropolitan Bandung	347.105	5079144	5572163	6535266	7009089
Kota Bandung	16.833	1808765	1818694	2136260	2228267
Kota Cimahi	4075	293213	350781	442167	483242
Kab. Bandung	302240	2786461	3127025	3716534	4017582
Kabupaten Sumedang*					
• Kec. Cimanggung	4.324	45585	52320	63686	64421
• Kec. Tanjung Sari	8.167	91102	106252	58728	63692
• Kec. Sukasari**	3.805	-	-	-	28420
• Kec. Jatinangor	2.587	54018	63324	83206	87238
• Kec. Rancakalong	5.074	-	53767	34685	36227

Sumber : BPS, Kotamadya Bandung dalam Angka; Kota Cimahi dalam Angka; Kabupaten Bandung dalam Angka; Kabupaten Sumedang dalam Angka Tahun 1991, 1997 dan 2003; BPS, Sensus Penduduk 2000; BPS Kabupaten Sumedang, Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1997

Keterangan : \* Pada tahun 2002 Kecamatan Tanjungsari terpecah menjadi Kecamatan Tanjungsari dan Sukasari (R4D Kabupaten Sumedang). Berdasarkan data luas wilayah kecamatan dalam Sumedang dalam Angka 2003, Kecamatan Tanjungsari dan Sukasari masing-masing mempunyai luas 3.562 Ha dan 47.12 Ha. Oleh sebab itu, dalam penghitungan kepadatan penduduk Kecamatan Tanjungsari sebelum tahun 2003 luas wilayah Kecamatan Tanjungsari yang dipergunakan adalah gabungan dari luas Kecamatan Tanjungsari dan Sukasari setelah tahun 2002. Dalam Studi ini, Kecamatan Pamulihan yang merupakan Kecamatan yang terbentuk dari gabungan beberapa desa di Tanjungsari dan Rancakalong tidak diikutsertakan dalam analisis karena keterbatasan data-data pendukung.

\*\* Merupakan pecahan dari Kecamatan Tanjungsari

#### **D. Prinsip-prinsip penataan ruang berkelanjutan (*Sustainable Spatial Planing*)**

Dalam penataan ruang berkelanjutan ada 4(empat) prinsip yaitu: (1) Prinsip manajemen kota, (2) integrasi kebijakan, (3) berpikir ekosistem, dan (4) kemitraan.

##### **1. Prinsip manajemen kota**

Manajemen kota dalam rangka keberlanjutan, pada esensinya merupakan proses politik. Proses manajemen kota yang berkelanjutan membutuhkan berbagai perangkat penunjang yang potensial untuk dikembangkan sebagai dasar-dasar pengintegrasian sistem lingkungan, sistem sosial, sistem ekonomi. Melalui penerapan perangkat penunjang ini, penyusun kebijakan pembanguna yang berkelanjutan akan menjadi semakin mampu mencakup seluruh perhatian utama dalam suatu sistem yang lebih makro.

##### **2. Prinsip integrasi kebijakan**

Koordinasi dan integrasi akan dapat terealisasikan apabila terbangun suatu kemauan untuk saling berbagi tanggung jawab. Secara horizontal, proses integrasi diharapkan mampu menstimuli efek sinergitas yang berkelanjutan dari dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi. Dan secara vertikal, proses integrasi dapat dilakukan antara pemerintahan didaerah, pemerintahan propinsi, lintas departemen di pemerintahan pusat, hingga negara-negara tetangga, dalam satu kesepakatan kebijakan bersama.

##### **3.Prinsip berpikir ekosistem**

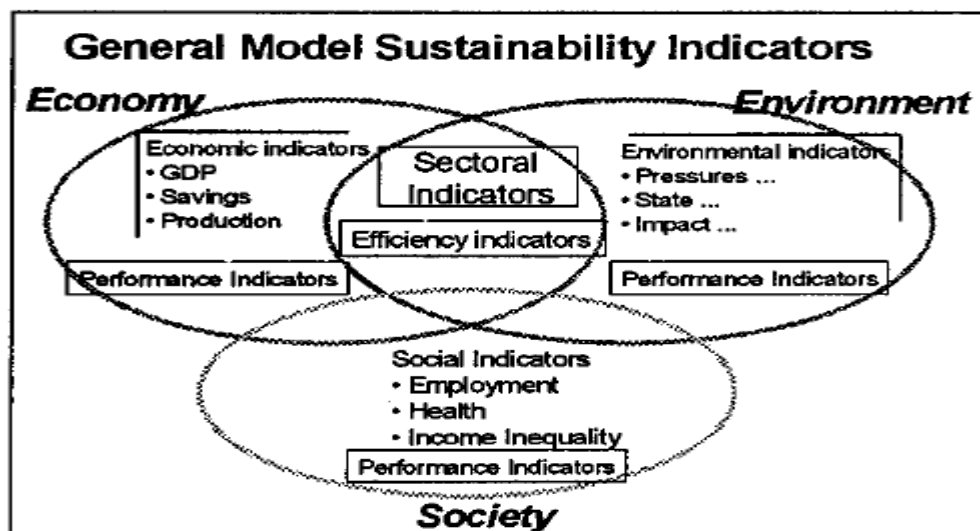
Cara berpikir ekosistem menempatkan kota sebagai suatu system yang kompleks yang berkarakteristik selalu bergerak dan lebih merupakan rangkaian proses perubahan dan pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, setiap energi, sumber daya alam dan limbah dari setiap kegiatan, membutuhkan perawatan, restorasi dan stimulasi.

#### 4. Prinsip kemitraan

Keberlanjutan adalah pembagian tanggung jawab. Kemitraan antara berbagai pihak dengan masing-masing kepentingannya menjadi penting. Sebagaimana diketahui bahwa keberlanjutan merupakan proses belajar, yang didalamnya berisikan *learning by doing*, saling berbagi pengalaman, pelatihan dan pendidikan profesi, *Cross disciplinary working*, kemitraan dan jaringan kerja, partisipasi dan konsultasi komunitas, mekanisme pendidikan inovatif, dan peningkatan kesadaran lingkungan, adalah elemen-elemen utama yang harus ditumbuh kembangkan.

Manajemen sumber daya alam berkelanjutan membutuhkan pendekatan terintegrasi dalam membangun lingkaran tertutup dari pemanfaatan SDA, energi dan limbah melalui mekanisme:

- a. Minimalisasi konsumsi SDA, terutama SDA yang tak terbarukan dan memanjangumurkan SDA yang terbarukan.
- b. Minimalisasi produk limbah melalui pemanfaatan kembali limbah dan atau *recycling*.
- c. minimalisasi polusi udara, tanah, dan air
- d. meningkat proporsi lahan terbuka hijau.



Kelestarian lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek sosial-ekonomi. Harus diciptakan suatu kondisi yang menmpatkan setiap nilai-nilai profit yang dikeluarkan dari setiap kegiatan ekonomi memiliki nilai tambah pada usaha yang ramah lingkungan. Pemda harus mampu menciptakan peluang-peluang kerja disektor-sektor yang ramah lingkungan, atau setidaknya mampu menunjang pada usaha peningkatan performa lingkungan.

Perencanaan penataan ruang merupakan konsepsi integrative antar sektor yang saling berkaitan. Inti dari konsep tersebut adalah tercapinya efesiensi dari pemanfaatan sumber daya tersedia. Selanjutnya dalam mengkaji dan menurunkan konsepsi perencanaan penataan ruang berkelanjutan dipandang perlu untuk mendeskripsikan konsep tersebut dalam serangkaian indikator yang pada gilirannya nanti akan sangat berguna sebagai alat dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang. Dapat dikemukakan dalam pembangunan indikator dari perencanaan tata ruang berkelanjutan akan ditemukan keterkaitan kinerja yaitu:

1. Kinerja ekonomi
2. kinerja lingkungan
3. kinerja sosial atau masyarakat

## **E. Analisis Data spatial**

### **1. Sosial-ekonomi**

Pertumbuhan penduduk wilayah metropolitan Bandung rata-rata 2,7 % per tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya sekitar 3,7 %. Dengan asumsi bahwa sampai dengan tahun 2025 belum ada upaya pengendalian mobilitas penduduk secara efektif maka laju pertumbuhan penduduk akan tetap tumbuh rata-rata 2,86 % atau 14,67 Juta Jiwa pada tahun 2025. Dari perkiraan jumlah penduduk tersebut maka 70 % atau sekitar 10 Juta merupakan penduduk perkotaan yang bermukim disekitar wilayah Kota

Bandung seperti Kota Cimahi, Padalarang dan Rancaekek yang merupakan wilayah pelimpahan arus urbanisasi ke kota Bandung.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2025

No	Zona	Kawasan Perkotaan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Kaw. Perkotaan	Kepadatan (jiwa/Ha)
1	Zona Bandung	Kota Bandung Kota Cimahi	23.248,0	3 Juta 750.00	161,30
2	Zona Padalarang	Padalarang	46.565,6	500.000	10,74
3	Zona Rancaekek	Rancaekek Majalaya	27.787,3	300.000 400.000	25,19
4	Zona Soreang	Soreang Banjaran	34.186,7	250.000 350.000	17,55
5	Zona Jatinangor	Jatinangor	13.466,3	200.000	14,85
6	Zona Lembang	Kota Lembang	46.023,1	100.000	2,17
7	Zona Gunung Halu-Ciwidey	Ciwidey	155.909,0	75.000	0,48

Sumber : Hasil Analisis Bapeda, 2005.

Bertitik tolak dari perkiraan laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi khususnya di wilayah perkotaan dan distribusi penyebarannya yang tidak merata mengarah perlu upaya penanganan yang lebih serius terhadap upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta penyebarannya baik melalui mekanisme administratif maupun mekanisme non-administratif.

Dari aspek perekonomian pertumbuhan ekonomi diwilayah Metropolitan Bandung secara umum dapat dikelompokkan sektor dominan diwilayah Kota Bandung –Kota Cimahi dan di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi perkembangan sektor ekonomi didorong oleh perkembangan sektor industri manufaktur sebesar 8,72 % per tahun dengan kontribusi sebesar 27,2 % terhadap PDRB atas dasar harga konstan sedangkan sektor jasa dan perdagangan tumbuh dengan laju 19,24 % dengan kontribusi sekitar 33 %. Untuk Wilayah Kabupaten Bandung sektor dominan yang berkembang diarah ini adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh

dengan laju rata-rata sebesar 9,11 % dengan kontribusi sebesar 51,8 % terhadap PDRB atas dasar harga konstan sedangkan sektor perdagangan tumbuh sebesar 3,4 % dengan kontribusi sebesar 14,8 % dan sektor pertanian tumbuh dengan laju 0,49 % per tahun dengan kontribusi sebesar 10,3 % atas dasar harga konstan.

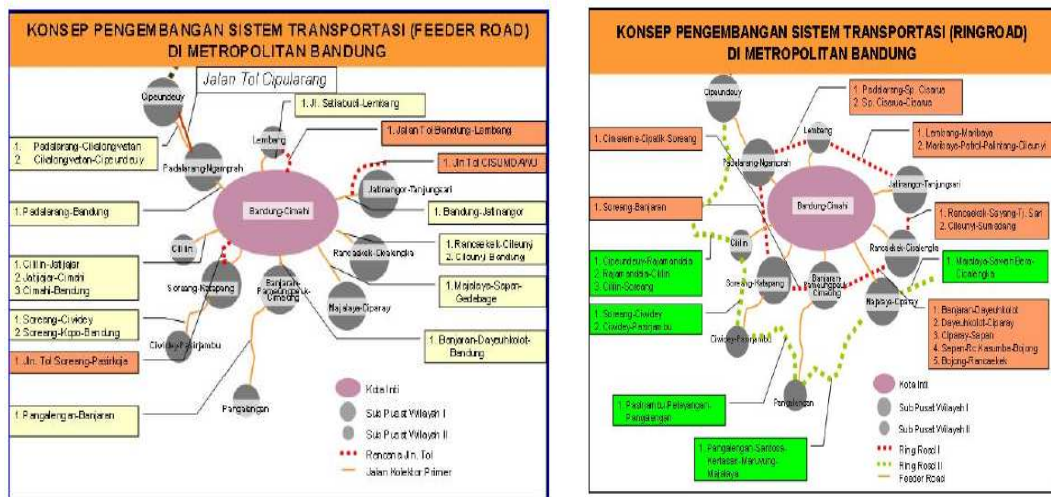
Berdasarkan hasil perhitungan *Locational Quotion* (LQ) didapat bahwa sektor-sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian diwilayah Metropolitan, adalah :

1. Industri Pengolahan
2. Listrik, Gas dan air bersih;
3. Bangunan/Konstruksi
4. Perdagangan, Hotel dan restoran
5. Pengangkutan dan Komunikasi;
6. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
7. Jasa-jasa lainnya

Dengan teridentifikasinya ke-7 sektor basis diatas yang pada umumnya adalah sektor-sektor perkotaan (sektor sekunder dan tersier) maka kecenderungan perkembangan wilayah metropolitan sampai dengan tahun 2025 cenderung berkembang kearah sektor perkotaan. Sektor perkotaan yang diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan adalah sektor industri manufaktur akibat diterapkannya AFTA dan kebijakan internal yang memperketat perijinan lokasi industri yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Sektor pertanian yang sifatnya produksi diwilayah diperkirakan akan tumbuh konstan sampai dengan tahun 2025 namun kecenderungan perkembangan pertanian yang sifatnya agribisnis diperkirakan akan tetap tumbuh lebih tinggi lagi. Demikian pula dengan sektor Jasa Pariwisata diperkirakan akan tetap berkembang dengan pesat.

## 2. Infrastruktur

Pengembangan sistem transportasi sebagai elemen pembentuk ruang dan keterhubungan untuk wilayah Metropolitan Bandung perlu diarahkan dalam membentuk keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah metropolitan, pengembangan jaringan transportasi tersebut merupakan salah satu kunci dari perwujudan struktur Metropolitan Bandung yang direncanakan. Salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan sistem transportasi Metropolitan Bandung adalah pengembangan sistem angkutan massal terpadu khususnya di wilayah inti Metropolitan Bandung.



Gambar. 6. Infrastruktur Sistem transportasi metropolitan Bandung  
 Penyediaan infrastruktur drainase yang terintegrasi merupakan salah satu kebutuhan dalam mendukung pengembangan pembangunan terutama dari kemungkinan terjadinya ancaman banjir.





Gambar 7. Infrastruktur wilayah persampahan metropolitan Bandung

### 3. Daya dukung

Kondisi daya dukung lingkungan di cekungan Bandung, saat ini kondisinya sudah sangat kritis menjadi factor pembatas bagi pengembangan pembangunan di Wilayah Metropolitan Bandung kedepan. Walaupun dengan asumsi terjadi upaya penanganan dan rehabilitasi lingkungan secara terpadu, namun upaya pemulihan terhadap perbaikan kondisi lingkungan ini akan memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Oleh karena itu maka arah pengembangan pembangun di wilayah Metropolitan Bandung kedepan tetap harus diarahkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai kondisi daya dukung yang sesuai, memasukan sentuhan-sentuhan teknologi serta upaya penegakan hukum lingkungan. Pemulihan daya dukung terutama diarahkan pada upaya pemulihan DAS Citarum beserta ke-11 Sub DASnya, upaya rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan resapan air dan pemulihan terhadap pencemaran udara diperkotaan melalui pembatasan angkutan pribadi dan menyediakan angkutan masal terpadu serta pengendalian pencemaran limbah udara dari kegiatan Industri yang saat ini masih ada.

Tabel 4. Luas kawasan hutan lindung dan budidaya

POLA TATA RUANG	LUAS (Ha)	Lahan Terbangun 1994	Lahan Terbangun 2001	Kenaikan	Kenaikan (%)
Hutan Konservasi	21.431,8	42,8	152,8	110,0	257,00
Hutan Lindung	72.715,5	393,4	1.558,2	1.164,8	296,08
Lindung Non Hutan	50.122,4	886,8	2.518,0	1.631,2	183,94
<b>SUB TOTAL</b>	<b>144.269,7</b>	<b>1.323</b>	<b>4.229</b>	<b>2.906</b>	<b>219,65</b>
Hutan Produksi	12.393,9	150,9	592,2	441,3	292,44
<b>Budidaya</b>	<b>183.067,2</b>	<b>39.558,1</b>	<b>54.592,9</b>	<b>15.034,8</b>	<b>38,00</b>
Diluar terbangun		143.504,0	128.416,4	-15.087,6	-10,51
<b>SUB TOTAL</b>	<b>195.461,1</b>	<b>183.213</b>	<b>183.601,5</b>	<b>388,5</b>	<b>21,20</b>
Danau/ Waduk/Situ	7.805,4	7.805,4	7.805,4	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>347.536,2</b>	<b>41.032,0</b>	<b>59.414,1</b>	<b>18.382,10</b>	<b>-</b>

Sumber : Hasil Analisis, Bapeda 2005

Keterangan : luasan berdasarkan pola tata ruang tersebut adalah luasan normatif berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam RTRWP.

#### 4. Kecenderungan arah Pengembangan

Dari evaluasi terhadap struktur pengembangan kawasan yang telah direkomendasikan MBUDP menunjukkan struktur tersebut tidak sepenuhnya terbentuk, pembentukan kota-kota satelit di sekitar Kota Bandung tidak berjalan dengan efektif karena masih kuatnya peranan Kota Bandung, belum terwujudnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas utama ke kota-kota di sekitar wilayah inti, belum efektifnya mekanisme pengendalian pembangunan, terbatasnya kemampuan pembiayaan serta belum optimalnya koordinasi. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadi pembangunan yang tetap terkonsentrasi di sekitar wilayah inti Kota Bandung, pengembangan permukiman mengikuti pola jaringan jalan utama (ribon development) serta pengembangan permukiman disekitar pinggiran Kota Bandung dan Cimahi bersifat tidak terintegrasi (sprawl development) yang mengakibatkan tidak efisien penyediaan infrastruktur dan fasilitas serta semakin mendorong terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perkotaan.

Bertitik tolak dari pertimbangan diatas maka arah pengembangan struktur pengembangan Metropolitan Bandung sampai dengan 2005, seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- a. Pengembangan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang berbasis daya dukung yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan dan permukiman tidak kearah kawasan konservasi;

- b. Pengembangan ekonomi di wilayah Metropolitan Bandung diarahkan pada kegiatan yang capital intensif bukan pada kegiatan ekonomi yang labour intensif dengan memperhitungkan perbandingan antara nilai tambah ekonomi yang tinggi dan beban biaya lingkungan yang harus ditanggung;
- c. Pengembangan sistem transportasi diarahkan dalam rangka memperkuat aksesibilitas Barat-Timur-Selatan secara integral dengan bertumpu pada penyediaan sistem angkutan masal;
- d. Penyebaran fungsi kota dari zona inti ke pusat-pusat zona perlu didorong melalui pelibatan peran serta dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan sistem insentif dan dis-insentif;
- e. Mendorong tumbuhnya pembangunan perkotaan yang polisentrik yang didukung dengan penyediaan sistem transportasi guna mengurangi panjang perjalanan;

Tabel 5. Sistem-sistem perkotaan

No	Kota	Status	Aktivitas	Pembangunan
1	Bandung	Pusat regional	Metropolitan yang multifungsional	Regional yang tetap terkendali
2	Jatinangor/ Cileunyi	Pusat regional	Pendidikan, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami / diarahkan
3	Cimahi	Pusat subwilayah metropolitan	Perumahan, perdagangan, pariwisata	Pusat alami
4	Lembang	Pusat subwilayah metropolitan	Perumahan, perdagangan, pariwisata	Pertumbuhan alami
5	Rancaekek/ Cicalengka	Pusat subwilayah	Perumahan, perdagangan, industri	Pusat pertumbuhan sekunder
6	Ngamprah/ Padalarang	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan
7	Soreang	Pusat subwilayah	Administrasi, perumahan	Pusat pertumbuhan primer
8	Banjarian/ Pameungpeuk	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan sekunder
9	Majalaya	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan primer
10	Ciwidey	Pusat lokal	Perumahan, pariwisata	Pertumbuhan alami
11	Cililin	Pusat lokal	Industri, perumahan	Pertumbuhan alami.
12	Batujajar	Pusat lokal	Industri, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami
13	Margahayu/ Dayeuhkolot	Pusat lokal	Industri, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami
14	Tanjungsari	Pusat lokal	Perumahan, perdagangan	Perkembangan terbatas

Sumber : BUDP II, MBUDP Assistance to Programme Preparation. Report No. 24.7 March 1994. *Urban Spatial Strategy.*



Gambar 8. Sistem-sistem perkotaan dimetropolitan Bandung



Gambar 9. Arahkan struktur tata ruang pengembangan metropolitan Bandung

## **F. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas dalam penataan ruang berkelanjutan metropolitan Bandung ada 4 (empat) prinsip yang dilakukan adalah prinsip *pertama* manajemen kota yang berarti daerah metropolitan merupakan satu kesatuan wilayah makro yang menyatukan aspek-aspek sosial-ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaannya, kedua kebijakan yang terintegrasi karena pengelolaan yang merupakan keterpaduan ke 3 aspek maka perlu juga dikembangkan kebijakan yang terintegrasi, ketiga berpikir satu ekosistem bahwa metropolitan Bandung terdiri dari beberapa ekosistem yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan apabila salah satu terganggu menyebabkan ekosistem yang terganggu juga, keempat prinsip kemitraan yaitu dalam penataan ruang perlu dikembangkan prinsip kemitraan dengan kesetaraan sehingga semua stake holders (multistake holders) dapat berperan memberikan masukan kepada penataan ruang metropolitan Bandung.

## **G. Daftar Pustaka**

- Bappeda Propinsi Jawa Barat (2001), *RTRWP Jawa Barat Tahun 2010*, Bandung
- Dinas Tata Ruang dan Permukiman (2004), *Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bandung 2010*, Bandung
- Djamiko,A. (2004). Arahana Pengembangan Wilayah Metropolitan Bandung. Jurnal Infomatek Volume 6 No:3. Bandung.
- Elgendy, Hany; Seidemann, Dirk; Wilske Sebastian (2004) *New challenges for city and regional planning: inner development of cities and regions for promoting sustainable development* In: ISoCaRP 40th International Planning Congress: "MANAGEMENT OF URBAN REGIONS" Congress CD, The Hague: ISoCaRP.
- Yunus. H,S. (2005) *Manajemen kota: Prespektif spasial*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Hermit. H. (2008). *Pembahasan Undang-Undang penataan Ruang*. Mandar Maju Bandung.

